

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Implementasi Akuntansi Pesantren Berbasis ISAK 35 di Madura

Fena Ulfa Aulia^{1*}, Ummu Kulsum², Nur Laila³, Sitti Wulandari⁴

IAIN Madura^{1,2,3,4}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : fenaulfa@iainmadura.ac.id

*Correspondence: fenaulfa@iainmadura.ac.id | Submission Received : 20-08-2024; Revised : 27-08-2024; Accepted : 31-08-2024; Published : 30-12-2024

Abstract

This research aims to identify and explore the extent to which Islamic boarding school accounting implementation in Madura is in accordance with ISAK 35 standards. Madura is known as a religious island with a majority Muslim population that still upholds religious values, besides being known as the religious island of Madura, it is also known as the island of santri, Due to the large number of Islamic boarding schools being established, currently the number of Islamic boarding schools in Madura is 1,386. In general, Islamic boarding schools in Madura are established in the form of foundations which are a form of non-profit organization founded by the community or a group of people and whose main aim is to provide social services without focusing on achieving profits. This research uses a descriptive qualitative approach, with primary data obtained through interviews and triangulation methods. This study was conducted at three Islamic boarding schools in three districts in Madura. The research results show that the three Islamic boarding schools have not implemented Islamic boarding school accounting in accordance with ISAK 35. The financial reports prepared are still simple and do not follow established accounting standards. In conclusion, the implementation of Islamic boarding school accounting in Madura is implemented differently with different formats in each Islamic boarding school because it does not yet refer to ISAK 35 due to limited human resources and unknowledge of Islamic boarding school administrators regarding accounting science..

Keywords: *Islamic boarding school, Islamic boarding school accounting, ISAK 35*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi sejauh mana implementasi akuntansi pesantren di Madura sesuai dengan standar ISAK 35. Madura dikenal sebagai pulau religius dengan penduduk mayoritas Muslim yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, selain dikenal sebagai pulau religius Madura juga dikenal sebagai pulau santri, karena banyaknya pesantren yang didirikan, saat ini jumlah pesantren di Madura sebanyak 1.386. Pada umumnya pesantren di Madura berdiri dalam bentuk Yayasan yang merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang didirikan oleh Masyarakat atau sekelompok orang dan tujuan utamanya memberikan layanan sosial dengan tidak berfokus pada pencapaian laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan triangulasi metode. Studi ini dilakukan pada tiga pesantren di tiga kabupaten di Madura.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pesantren tersebut belum menerapkan akuntansi pesantren sesuai dengan ISAK 35. Laporan keuangan yang disusun masih sederhana dan belum mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan. Kesimpulannya, implementasi akuntansi pesantren di Madura diterapkan secara berbeda dengan format yang berbeda di masing-masing pesantren karena belum mengacu pada ISAK 35 yang disebabkan terbatasnya SDM dan minimnya pengetahuan pengurus pesantren terhadap ilmu akuntansi.

Kata kunci: *Akuntansi Pesantren, ISAK 35, Pesantren*

INTRODUCTION

Madura dikenal sebagai pulau religius dengan penduduk mayoritas muslim yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Selain dikenal sebagai pulau religius, Madura jugadikenal sebagai pulau santri karena banyaknya jumlah pesantren yang didirikan. Jumlah pesantren yang ada di Pulau Madura saat ini sebanyak 1.386 dengan jumlah santri 195.211 (Berta SL Danafia, 2023). Pada umumnya pondok pesantren yang ada di Madura berdiri dalam bentuk yayasan. Yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang didirikan oleh masyarakat atau sekelompok orang dan fokus utamanya memberikan layanan sosial dengan tidak berfokus pada pencapaian laba.

Banyaknya jumlah pesantren yang ada di Madura menunjukkan bahwa hampir sebagian besar aktivitas organisasi nirlaba bergerak di bidang pendidikan berbasis agama. Banyaknya jumlah pesantren juga menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang tinggi di organisasi nirlaba karena adanya aktivitas kas masuk yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebagai penghasilan pondok pesantren maupun dana hibah dan donasi. Selain adanya aktivitas penerimaan kas, juga terdapat aktivitas pengeluaran kas/ setara kas untuk operasional maupun non operasional. Adanya aktivitas ekonomi selain aktivitas layanan sosial di pondok pesantren menjadi penting untuk menyusun laporan atas aktivitas ekonomi sebagai bentuk pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang ada dalam bentuk laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pesantren tidak terlepas dari akuntansi pesantren. Secara harfiah, akuntansi dimaknai sebagai aktivitas identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhtisaran kondisi ekonomi suatu organisasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi stakeholder (Aulia, 2020). Akuntansi pesantren dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran aktivitas- aktivitas ekonomi berdasarkan pedoman akuntansi berterima umum yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis oleh para penggunanya. Akuntansi pesantren penting untuk diterapkan agar laporan keuangan yang disusun memuat informasi yang mencerminkan kondisi pondok pesantren secara representatif dan profesional.

Mengacu pada pasal 52 (1) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, menyebutkan bahwa sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yayasan dilakukan dengan cara menyajikan ikhtisar laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) yayasan dipublikasikan pada papan pengumuman yayasan. Publikasi laporan keuangan yayasan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

yayasan kepada para stakeholder terutama bagi donatur untuk menjaga tingkat kepercayaan atas dana yang telah didonasikan (Khilmiah, 2020). Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada pengurus dan donator yayasan, pelaporan keuangan pesantren sejatinya juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) (Triyuwono, 2012). laporan keuangan yang dipublikasikan harus terjaga kualitasnya agar informasi yang ada tidak bias dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas disusun berdasarkan standar akuntansi dan memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yang relevan, reliabel, komparatif, dan mudah dipahami.

Fenomena yang terjadi di lapangan, laporan keuangan pondok pesantren disajikan dalam format yang beragam sehingga tidak dapat diperbandingkan oleh pembaca laporan keuangan (Suherman & Pamungkas, 2019). Berdasarkan pra observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, format laporan keuangan Pondok Pesantren Attaufiqiyah dan laporan keuangan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru memiliki format yang tidak sama untuk jenis laporan keuangan yang sama. Selain itu tingginya tingkat adab santri dan pengurus sangat tinggi terhadap para kyai dan ulama yang dikenal dengan istilah “sami’naa wa atha’na” yang memiliki arti “kami mendengar dan patuh”. Istilah ini dalam masyarakat Madura dimaknai sebagai wujud kepatuhan terhadap dawuh guru/ kyai atau ulama. Tingginya tingkat adab ini juga dapat menimbulkan risiko terhadap penyajian informasi keuangan yang disajikan oleh pengurus pondok pesantren yang pada umumnya merupakan santri tingkat atas maupun alumni. Kecenderungan penyajian laporan keuangan tidak luput dari bias dawuh kyai. Oleh karena itu penting untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pesantren agar kualitas informasi yang termuat bisa diandalkan dan dibandingkan.

Standar akuntansi yang dapat digunakan oleh pondok pesantren saat ini, yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas nirlaba dan merupakan hasil revisi dari PSAK No. 45 (Mujiani et al., 2023). Sebelum menggunakan ISAK 35, acuan yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan pesantren menggunakan PSAK 45. Namun penggunaan PSAK 45 dapat menciptakan inkonsistensi karena terdapat pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama (Andriani et al., 2021), Mengacu pada ISAK 35, laporan keuangan yang seharusnya disusun oleh pondok pesantren sebagai entitas nirlaba meliputi: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Sari, n.d.). Perbedaan mendasar antara PSAK 45 dan ISAK 35 terletak pada pengklasifikasian aset neto. PSAK 45 menggabungkan aset neto terikat permanen dan temporer, sementara ISAK 35 dilakukan pemisahan pengklasifikasian aset neto (Rumiatty, 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari para peneliti sebelumnya di antaranya: Pertama, penelitian tentang implementasi akuntansi pesantren pada pondok pesantren di Al- Mujaddadiyah Kota Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al- Mujaddadiyah belum mencatat aset yang dimiliki sehingga juga tidak ada pencatatan penyusutan aset pondok pesantren (Kirowati et al., 2021). Kedua, penelitian tentang pemahaman akuntansi masjid dan pesantren di Negeri Kedah, Malaysia yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pengurus masjid, masyarakat, dan mahasiswa

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

UUM di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah kurang memahami akuntansi mesjid pun pesantren (Puspita et al., 2022). Ketiga, penelitian tentang penerapan akuntansi pesantren di Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi sudah menerapkan akuntansi pesantren namun belum sempurna (Rozaidin & Adinugraha, 2020). Keempat, (Khilmiah, 2020) menyampaikan hasil penelitian bahwa Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah sudah menyusun laporan keuangan berbasis PSAK 45 dan hanya digunakan untuk kepentingan internal saja. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Suherman & Pamungkas, 2019) menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Matuq belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren meskipun sudah menggunakan aplikasi Zahir dalam penyusunan laporan keuangan. Keenam, penelitian penerapan ISAK 35 pada Masjid Syamsul Ulum belum diterapkan (Wardoyo et al., 2022). Namun demikian penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian akuntansi pesantren yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya masih menggunakan PSAK 45 dan SAK ETAP, sementara penelitian ini menggunakan ISAK 35 hasil revisi dari PSAK 45. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian Implementasi Akuntansi Pesantren Berbasis ISAK 35 di Madura sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan akuntansi pesantren khususnya di Madura

LITERATURE REVIEW

A. Organisasi Nirlaba

Organisasi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu profit oriented dan non oriented. Organisasi profit oriented merupakan organisasi yang tujuan utamanya untuk berfokus menghasilkan laba. Sementara itu organisasi non profit oriented tidak berfokus untuk menghasilkan laba. Organisasi non profit oriented dikenal dengan istilah nirlaba yang sifat kepemilikannya bersifat public dan privat seperti lembaga-lembaga publik. Lembaga public ini bisa berupa organisasi nirlaba pemerintah ataupun non pemerintah seperti yayasan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan organisasi politik (Andarsari, 2017).

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik dan sifat diantaranya: pertama, sumber daya organisasi biasanya diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan. Kedua, organisasi menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba, meskipun terkadang menghasilkan laba, maka laba tidak pernah dibagikan kepada pendiri/ pemilik entitas. Ketiga, kepemilikan organisasi tidak dapat dipindahtangankan baik dengan cara dijual, dialihkan, ditebus kembali. Keempat, kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya saat likuidasi.

Organisasi nirlaba sebagai wujud dari organisasi masyarakat yang berangkat dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan pengguna laporan adalah untuk menilai jasa organisasi dan kemampuan going concern dan menilai cara manajer melaksanakan tanggungjawab dan aspek kinerja manajer. Selain itu dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan transparan memberikan kemudahan manajer untuk membuat suatu pertanggungjawaban kepada pengguna laporan.

Selain dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara transparansi, yayasan juga harus menjaga kualitas primer dan sekunder atas

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

informasi keuangan organisasi yang dilaporkan. Kualitas primer laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan dan reliabel, sementara laporan keuangan memiliki kualitas sekunder jika informasi yang disajikan dapat dibandingkan dan konsistensi (Hery, 2011). Suatu informasi keuangan akan dapat digunakan jika informasi yang disajikan relevan sehingga dapat memengaruhi keputusan para pemakai informasi keuangan yayasan. Selain harus relevan, informasi yang disajikan tidak boleh menyesatkan dan bebas dari salah saji materian sehingga informasi yang dimuat dalam laporan keuangan bersifat andal atau reliabel (Harmono, 2020).

B. ISAK Dalam Perkembangan Akuntansi Pesantren

Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan BankIndonesia (BI) merupakan salah satu contoh keberpihakan instansi yang concern terhadap perkembangan akuntansi untuk pesantren. Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah untuk memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum adanya ISAK 35 sebagai acuan atau pedoman pelaporan keuangan entitas nonlaba pedoman yang digunakan yaitu PSAK 45. Proses penerbitan ISAK 35 dilakukan di saat yang sama dengan proses pencabutan PSAK 45, ISAK 35 mulai disahkan pada 11 April 2019 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 (Neni et al., 2023).

Entitas pelaporan adalah suatu entitas berbadan hukum yang berbentuk yayasan. Iniberarti pedoman ini untuk dipakai pesantren yang sudah mempunyai badan hukum. dankonsekuensinya pesantren yang sudah berbadan hukum dan berbentuk yayasan yaitu bahwa asset,liabilititas dari pondok pesantren harus bisa dibedakan dan dipisahkan dengan asset dan liabilitasdari organisasi lain ataupun perseorangan..

Laporan keuangan didefinisikan sebagai penyajian secara terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja entitas. Dari definisi laporan keuangan yang ada bisa diketahui bahwa tujuan disusunnya laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan sehingga dapat memprediksi arus kas masa depan organisasi. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para penggunanya untuk pengambilan keputusan.

C. Jenis – Jenis Laporan Keuangan Pondok Pesantren

Komponen-komponen laporan keuangan Yayasan pondok pesantren ber dasarkan ISAK terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan organisasi nirlaba merupakan laporan yang memuat informasi posisi aset terhadap liabilitas dan aset neto organisasi nirlaba itu sendiri. Semakin tinggi aset yang bersumber dari internal organisasi itu sendiri maka semakin baik kondisi maupun posisi keuangan suatu organisasi. Namun sebaliknya, semakin tinggi suatu aset yang bersumber dari eksternal dalam hal ini hutang, maka semakin tidak baik kondisi maupun posisi keuangan organisasi. laporan keuangan ini terdiri dari komponen posisi keuangan pada umumnya, yaitu aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan Panjang, serta aset neto without restriction and with restriction. Penyajian aset pada laporan keuangan biasanya disajikan dari yang paling likuid sampai yang tidak mudah likuid. Sementara penyajian

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

kewajiban atau liabilitas disajikan dari yang paling mendekati jatuh tempo hingga yang jatuh temponya masih lama (Kasmir, 2014). Poin mendasar yang membedakan komponen posisi keuangan ISAK 35 dengan lainnya yaitu terletak pada komponen aset neto. Aset neto di laporan posisi keuangan non ISAK 35 lebih dikenal dengan istilah EKUITAS. Ekuitas dalam organisasi nirlaba seperti pondok pesantren ini terdiri dari ekuitas yang dibatasi maupun tidak dibatasi baik berupa waqaf maupun hibah dari internal maupun eksternal pondok pesantren. Makna kata dibatasi memiliki arti bahwa aset waqaf maupun hibah yang diberikan oleh wakif dibatasi penggunaannya terhadap aset yang diwaqafkan. Sementara itu, aset neto tanpa pembatasan memiliki makna bahwa aset waqaf maupun hibah tidak dibatasi penggunaannya oleh wakif maupun pemberi hibah.

2. *Laporan Penghasilan Komprehensif*

ISAK 35 menggunakan istilah "Laporan Penghasilan Komprehensif" sebagai pengganti istilah "Laporan Aktivitas" dalam versi PSAK 45. Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas nonlaba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban. Laporan penghasilan komprehensif dibagi kedalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto : (1) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya, dan (2) Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya.

3. *Laporan Perubahan Aset Neto*

Istilah Laporan Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset Neto dalam entitas nonlaba diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : a) Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya, b) Aset Neto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya. pada dasarnya laporan ini mirip dengan laporan perubahan ekuitas pada entitas bisnis dengan menyajikan saldo awal, laba tahun berjalan, laba ditahan dan saldo akhir. Namun demikian laporan perubahan aset neto ini memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling mudah dilihat yaitu terletak pada komponen-komponennya, serta adanya pengklasifikasian antara perubahan aset neto without restriction and with restriction.

4. *Laporan Arus Kas*

Laporan Arus Kas entitas nonlaba sama dengan laporan arus kas untuk entitas bisnis, dimana arus kas dibagi ke dalam tiga aktivitas yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas dapat menggunakan dua metode, yaitu metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Penggunaan informasi arus kas dapat berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas maupun setara kas serta untuk menilai kebutuhan organisasi dalam penggunaan kas (Surya, 2012).

5. *Catatan Atas Laporan Keuangan*

Catatan Atas Laporan Keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci. Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan Catatan B wajib disajikan. Catatan C, D dan E menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi non laba.

D. Konsep Dasar ISAK 35

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan :

- a) ISAK 35 tentang laporan keuangan entitas berorientasi non laba.
- b) Amandemen PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan tentang judul keuangan
- c) PSAK 1 (Penyesuaian Tahun 2019): Penyajian Laporan Keuangan.
- d) PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45: Penyajian Laporan Keuangan.
- e) ISAK 35, Amandemen PSAK 1, PPSAK 13 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

Karakteristik entitas non laba berbeda dengan entitas berorientasi laba. Perbedaan utama

yang mendasar terletak pada cara entitas non laba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasinya. Entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang seimbang dengan jumlah sumber daya yang telah diberikan. Akibat dari karakteristik tersebut, timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis contohnya penerimaan sumbangan. Laporan Keuangan Entitas Non laba Sesuai ISAK 35. Dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren berbasis ISAK 35 perlu untuk membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan dengan tetap memperhatikan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan sehingga tidak membiaskan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

E. Akuntansi Pesantren

a. Aset Pesantren

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh yayasan pondok pesantren sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh yayasan pondok pesantren. Aset dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah : Aset yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal dari yayasan pondok pesantren yaitu satu tahun; b. Aset yang dimiliki untuk diperdagangkan; c. Aset yang diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau d. Kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan (Hartono, 2023). Beberapa contoh aset lancar yaitu, kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Beberapa contoh aset lancar yaitu, kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Kas dan setara kas diakui secara akrual dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Namun jika kas yang diterima dalam bentuk mata uang asing maka diakui secara cash basis atau pada saat uang diterima sebesar nominal yang diterima serta dinilai dalam mata uang rupiah. Sementara itu, aset tidak lancar adalah aset-aset yang tidak termasuk aset lancar seperti gedung, kendaraan, investasi pada entitas lain, dan aset tak berwujud.

b. Liabilitas Pesantren

Pedoman akuntansi pesantren juga menggunakan akuntansi liabilitas untuk

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

pos pasiva yaitu kewajiban masa kini yang timbul akan transaksi atau peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi yayasan pondok pesantren yang memberi manfaat ekonomi. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan yang baik atau bertindak dengan cara yang adil (constructive obligation). Liabilitas pondok pesantren seperti halnya organisasi yang lain dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah :

- a) Liabilitas akan selesai dalam waktu siklus normal satu periode
- b) Liabilitas tujuan diperdagangkan
- c) Jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
- d) Pondok pesantren tidak ada resiko syarat sekurang kurangnya dalam masa waktu penyelesaian atau dalam waktu jatuh tempo.

Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak termasuk dalam liabilitas jangka pendek atau dengan kata lain jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal periode laporan. Pendapatan diterima dimuka adalah Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diterima dimuka

adalah penerimaan kas dan setara kas oleh unit usaha yayasan pondok pesantren atas penjualan barang dan penyediaan jasa yang belum dilakukan. Misalnya sewa diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat penerimaan sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam liabilitas jangka pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan, dan Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam liabilitas jangka panjang, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

c. Aset Neto Pesantren

Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas Aset neto dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pihak yang memberikan sumber daya terhadap penggunaan sumber daya tersebut, atau adanya pembatasan penggunaan yang diatur dalam ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang memberi sumber daya kepada yayasan pondok pesantren dapat memberikan pembatasan penggunaan sumber daya tersebut. Dana yang diterima tersebut menjadi bersifat terikat penggunaannya. Dana yang diterima yayasan pondok pesantren dapat bersifat terikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syariah. Pembatasan aset neto dapat bersifat temporer ketika pembatasan bersifat sementara sampai dengan jangka waktu tertentu atau tercapainya tujuan, atau pembatasan yang bersifat permanen ketika tidak ada batasan waktu atau pencapaian tujuan (STAI Al Husain Magelang & Yanuar, 2019).

F. Kebijakan Akuntansi Pesantren

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren bahwa Kebijakan akuntansi Yayasan pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP. Masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, Dimana belum diatur dalam SAK ETAP maka pengurus Yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian.
3. Menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari Yayasan pondok pesantren.
4. Menggambarkan substansi ekonomi suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
5. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
6. Mencerminkan kehati-hatian.
7. Mencakup semua hal yang material.

Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, antara lain:

1. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa.
2. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam Konsep dan Prinsip Pervasif dari SAK ETAP.
3. Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isus serupa dan terkait.

G. Materialitas dan Periode Pelaporan

Penyajian laporan keuangan yayasan pondok pesantren didasarkan pada konsep materialitas. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Laporan keuangan pesantren disajikan yayasan secara pondok tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi. Dalam hal yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan dengan cara mendeskripsikan kondisi konkrit implementasi akuntansi pesantren yang terjadi di Madura. Adapun Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 3: Pertama, Pondok Pesantren Attaufiqiyah yang berlokasi di Jl. Raya Bluto Lenteng Km.2 Desa Aeng Baja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Kedua, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru yang beralamat di Desa Kacok Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketiga, Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah yang berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa, Desa

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Tanggumong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan bendahara umum masing-masing pondok pesantren di Madura. Sementara itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pondok pesantren. Data penelitian diperoleh dengan cara teknik wawancara semi terstruktur serta dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari pelaksana akuntansi pesantren di lapangan, kemudian peneliti jabarkan dengan cara mendeskripsikan sehingga mudah untuk dipahami. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian secara induktif serta mencari pola, model, tema, serta teori yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini. Berikut beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan triangulasi dengan Teknik metode. Jenis triangulasi metode digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan laporan keuangan serta catatan-catatan keuangan yang dapat mencerminkan akuntansi pesantren. Pengecekan keabsahan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui pengumpulan data seperti mengecek informasi melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Implementasi Akuntansi Pesantren di Madura

1. Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah

Pondok pesantren ini hanya terdiri dari empat lembaga Pendidikan dan tidak memiliki unit usaha bisnis sehingga pendapatan utama dari pondok pesantren ini hanya bersumber dari infaq para santri. Hal ini disampaikan oleh pemilik sekaligus pengasuh pondok pesantren, yaitu Lora Widad.

Akuntansi pesantren yang dilakukan di pondok pesantren ini dilakukan dengan sangat sederhana sebatas pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di pondok pesantren dan dibahas atau dipertanggung jawabkan dalam rapat pengurus dan pegasuh pondok pesantren saat bulan Ramadhan. Oleh karena itu tutup tahun pembukuan pelaporan keuangan Pondok Pesantren Al- Mahmudiyah dilakukan setiap Ramadhan.

Meskipun pencatatan keuangan disampaikan untuk dibahas di bulan Ramadhan, akan tetapi masing-masing Lembaga tidak menyetorkan dan melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan uang pondok pesantren secara komprehensif kepada bendahara umum yayasan. Pencatatan keuangan hanya disampaikan dan dibahas Bersama sebagai bentuk pertanggung jawaban bendahara per lembaga saja. Selain tidak melakukan pencatatan tentang penghasilan komprehensif, pondok pesantren ini juga tidak melakukan pencatatan terhadap posisi keuangan yayasan, serta laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Waqaf berupa tanah milik pengasuh pesantren juga tidak dicatat dalam catatan keuangan pondok pesantren.

Untuk menguji kevalidan hasil wawancara yang telah disampaikan oleh informan, peneliti melakukan triangulasi metode dengan cara melihat dokumentasi pencatatan

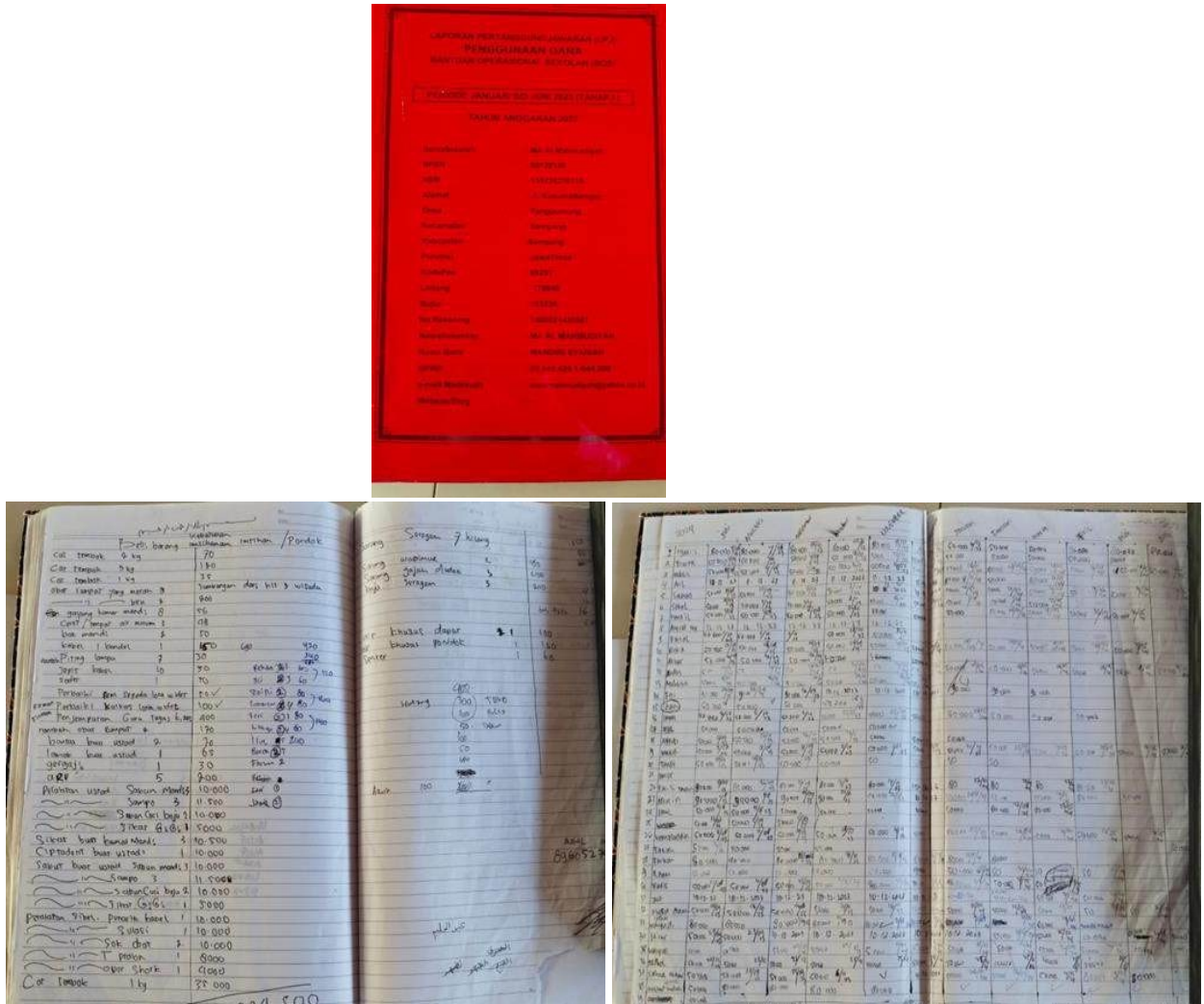
Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

pelaporan keuangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al- Mahmudiyah. Berikut ini merupakan contoh bentuk pelaporan keuangan pondok pesantren ini:

Gambar 1 Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah



Sumber: Pondok Pesantren Al-Mahmudiyah

2. Pondok Pesantren Miftahul Ilmu Kebun Baru

Pondok pesantren ini memiliki 21 lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga I'dadiyah (putra dan putri), RA Al-Raudlah, Ra Iv Pal. Kota, Mid. Pal. Kota, Mid. Putra, Mid. Putri, Mtsd Putra, Mtsd Putri, Atm Putra, Atm Putri, Tk. Raudlatul Jadid, Mi Salafiyah, Smp Plus, Mts Mukb, Ma Putri, Ma. Wachid Hasyim, Smk Miftahul Ulum Kb, Smk Wachid Hasyim, Dan Labsoma.

Selain memiliki lembaga Pendidikan Islam, Yayasan pondok pesantren ini juga memiliki unit usaha bisnis berupa kantin dan mini market kopontren. Pencatatan keuangan dilakukan oleh masing-masing bendahara bidang yang kemudian direkap oleh bendahara umum yayasan, yaitu Ustadz Mulyadi

Laporan keuangan di pondok pesantren ini disusun tiap akhir bulan hijriyah dan Menyusun laporan keuangan tahunan di bulan Ramadhan. Laporan keuangan yang

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

disusun oleh bendahara umum hanya melakukan pencatatan secara umum, sementara detail pencatatan dilakukan oleh masing-masing lembaga. Periode pelaporan keuangan di pondok pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru ini memiliki periode tutup buku di bulan Ramadhan setiap tahunnya melalui rapat pertanggung jawaban berupa laporan kegiatan dan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun di pondok pesantren ini berupa laporan rekapitulasi saldo keuangan, laporan kas bulanan, dan laporan belanja yang disusun oleh masing-masing bendahara lembaga. Berikut ini merupakan contoh laporan keuangan yang disusun oleh bendahara umum Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Gambar 2 Jenis – Jenis Laporan Rekapitulasi Saldo Keuangan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru

البيانات المالية
بمعهد مفتاح العلوم كيون بارو السفلى
السنة الدراسية : ١٤٤٦\١٤٤٥ هـ
من شهر ذي القعدة

NO	NAMA	SALDO SEBELUMNYA	DEBET	KREDIT	SALDO	KETERANGAN	
						DI BENDUM	DI LEMBAGA
1	PONDOK PESANTREN KEBUN BARU	Rp 4.481.692	Rp 183.856.558	Rp 136.998.839	Rp 42.376.027	Rp 42.376.027	Rp -
2	I'DADIYAH PUTRA	Rp 11.838.500	Rp 1.515.000	Rp 775.000	Rp 12.578.500	Rp 11.699.500	Rp 879.000
3	I'DADIYAH PUTRI	Rp 5.146.500		Rp 1.122.500	Rp 4.024.000	Rp 12.838.000	Rp 8.814.000
4	RA AL-RAUDLAH	Rp 5.276.000	Rp 7.747.500	Rp 864.000	Rp 1.607.500	Rp 6.170.000	Rp 4.562.500
5	RA. IV PAL. KOTA	Rp 263.000	Rp 118.000	Rp 300.000	Rp 81.000		Rp 81.000
6	MID. PAL. KOTA	Rp 263.000			Rp 263.000		Rp 263.000
7	MID. PUTRA	Rp 20.276.000	Rp 8.705.000	Rp 7.646.500	Rp 21.334.500	Rp 15.183.500	Rp 6.151.000
8	MID. PUTRI	Rp 5.207.000		Rp 1.607.000	Rp 3.600.000	Rp 43.965.000	Rp 40.365.000
9	MTSD PUTRA	Rp 11.851.000	Rp 11.306.500	Rp 8.891.000	Rp 14.266.500	Rp 11.002.000	Rp 3.264.500
10	MTSD PUTRI	Rp 2.151.500	Rp 8.397.500	Rp 889.000	Rp 5.357.000	Rp 19.687.500	Rp 14.330.500
11	ATM PUTRA	Rp 6.109.500	Rp 1.350.000	Rp 180.000	Rp 4.939.500	Rp 5.507.500	Rp 568.000
12	ATM PUTRI	Rp 2.082.000	Rp 920.000	Rp 451.000	Rp 1.613.000	Rp 3.706.500	Rp 5.319.500
13	TK. Raudlatul Jadid	Rp 4.124.800	Rp 410.000	Rp 3.686.000	Rp 848.800	Rp 1.550.750	Rp 701.950
14	MI SALAFIYAH	Rp 156.278.100		Rp 6.934.500	Rp 149.343.600	Rp 141.672.200	Rp 7.671.400
15	SMP PLUS	Rp 145.793.711		Rp 11.982.000	Rp 133.811.711	Rp 125.455.600	Rp 8.356.111
16	MTS MUKB	Rp 99.280.219	Rp 850.000	Rp 28.075.067	Rp 72.055.152	Rp 38.390.450	Rp 33.664.702
17	MA PUTRI	Rp 437.201	Rp 159.900.000	Rp 129.765.500	Rp 30.571.701	Rp 17.645.650	Rp 12.926.051
18	MA. WACHID HASYIM	Rp 10.370.850	Rp 76.860.000	Rp 25.291.500	Rp 61.939.350	Rp 63.442.700	Rp 1.503.350
19	SMK MIFTAHUL ULUM KB	Rp 296.391.500	Rp 123.120.000	Rp 74.257.400	Rp 345.254.100	Rp 307.398.100	Rp 37.856.000
20	SMK WACHID HASYIM	Rp 92.045.550		Rp 10.436.500	Rp 81.609.050	Rp 20.734.300	Rp 60.874.750
21	LABSOMA	Rp 681.622		Rp 1.494.000	Rp 812.378		Rp 812.378

Sumber : Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Gambar 3 Laporan Kas Bulanan

REKAPITULASI KAS BULANAN				JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN		
TKS RAUDATUL JADID				JUMLAH PEMBELANJAAN		
###				SALDO PENDAPATAN		
NO	BULAN	JUMLAH MASUK	JUMLAH KELUAR	SALDO KAS	PINJAM PD FIAK LAIN	KETERANGAN
01	SALDO AWAL TAHUN			Rp -		
02	RAMADLAN		Rp 13.612.200	Rp 13.612.200	Rp 800.000	
03	SYAWAL	Rp 18.670.000	Rp 933.000	Rp 4.124.800	Rp 13.612.200	
04	D. QO'DAH	Rp 410.000	Rp 3.686.000	Rp 848.800		
05	D. HIJIAH	Rp 12.850.000	Rp 11.450.000	Rp 2.248.800		
06	MUHARRAM			Rp 2.248.800		
07	SHAFAR			Rp 2.248.800		
08	R. AWAL			Rp 2.248.800		
09	R. AKHIR			Rp 2.248.800		
10	J. AWAL			Rp 2.248.800		
11	J. AKHIR			Rp 2.248.800		
12	RAJAB			Rp 2.248.800		
13	SYA'BAN			Rp 2.248.800		

Sumber: Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru

Gambar 4 Laporan Belanja

DAFTAR PENDAPATAN DAN PENGELUARAN										
TKS RAUDATUL JADID										
TAHUN PELAJARAN 1445/1446										
NO	KODE	URAIAN TRANSAKSI	RAMADLAN	SYAWAL	DZ. QO'DAH	DZ. HIJIAH	MUHARRAM	SHAFAR	R. AWAL	R. AKHIR
A. PEMASUKAN										
		JUMLAH PENGELUARAN	-	933.000	3.686.000	11.450.000	-	-	-	-
		SALDO AKHIR BULAN	-	13.612.200	4.124.800	848.800	2.248.800	-	-	-
Keterangan										
Mengetahui										
Kepala Sekolah										
#REF!										
Bendahara Madrasah										

Sumber: Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Dari gambar 2-3 dapat diketahui bahwa format laporan keuangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru masih sederhana. Meskipun sederhana, bendahara umum sudah mengenal double entry debit kredit meskipun belum memahami makna balancing. Meskipun sudah dilakukan rekapitulasi saldo keuangan, pelaporan keuangan yang dilakukan di pondok pesantren ini belum dilakukan secara komprehensif karena pencatatan keuangan dari unit bisnis pondok pesantren tidak dicatat oleh bendahara umum yayasan. Selain tidak dilakukan secara komprehensif, Yayasan pondok pesantren ini belum melakukan pencatatan asset neto baik berupa waqaf, infaq, dan sumbangan.

3. Pondok Pesantren At-Taufiqiyah

Implementasi akuntansi pesantren di Yayasan ini masih dilakukan secara sederhana yaitu berupa hasil rekap pemasukan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendahara umum Yayasan pondok pesantren yaitu Bapak Abdul Basit. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Wahasah, selaku sekretaris jenderal pondok pesantren.

Berikut ini merupakan jenis-jenis pelaporan keuangan yang disusun oleh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah:

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Gambar 5 Jenis – Jenis Laporan Keuangan Pondok Pesantren At-Taufiqiyah

REKAPITULASI KEUANGAN YAYASAN AT-TAUFIQIYAH (YASFI) AENGBAJARAJA BLUTO SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2013-2014							
NO	PEMASUKAN	JUMLAH	KET	NO	PENGELUARAN	JUMLAH	KET
1	SALDO AWAL TAHUN	126.187.527		1	PAUD AT-TAUFIQIYAH	3.870.000	
2	SPP PAUD AT-TAUFIQIYAH	-		2	TK AT-TAUFIQIYAH	1.473.000	
3	SPP TK AT-TAUFIQIYAH	-		3	MI AT-TAUFIQIYAH	51.519.000	
4	BOS MI AT-TAUFIQIYAH	36.700.000		4	MTs AT-TAUFIQIYAH	66.261.100	
5	BOS MTs AT-TAUFIQIYAH	112.010.000		5	MA AT-TAUFIQIYAH	112.487.000	
6	BOS MA AT-TAUFIQIYAH	174.600.000		6	MD AT-TAUFIQIYAH	19.326.800	
7	SPP MD AT-TAUFIQIYAH	34.325.000		7	PP AT-TAUFIQIYAH PUTRA	3.394.600	
8	SPP PP AT-TAUFIQIYAH PUTRA	14.630.000		8	PP AT-TAUFIQIYAH PUTRI	11.987.500	
9	SPP PP AT-TAUFIQIYAH PUTRI	20.780.000		9	BIAYA PEMBANGUNAN	137.387.900	
10	INFAQ PAUD AT-TAUFIQIYAH	-		10	ADM BANTUAN PEMERINTAH	-	
11	INFAQ TK AT-TAUFIQIYAH	560.000		11	BIAYA LKSA	21.957.500	
12	INFAQ MI AT-TAUFIQIYAH	3.120.000		12	SARANA PERPUSTAKAAN	5.556.000	
13	INFAQ MTs AT-TAUFIQIYAH	7.250.000		13	YAYASAN AT-TAUFIQIYAH bg OPS	41.021.800	
14	INFAQ MA AT-TAUFIQIYAH	11.050.000		14	Plurang Guru dan Lembaga	97.801.700	
15	INFAQ PP Pa AT-TAUFIQIYAH	7.045.000					
16	INFAQ PP Pi AT-TAUFIQIYAH	20.900.000					
17	BANTUAN PEMERINTAH	44.457.500					

REALISASI PENDAPATAN MADRASAH IBTIDAIYAH AT-TAUFIQIYAH AENGBAJA RAJA BLUTO SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2022/2023				
NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	SELISIH
1	BOS	180.000.000	183.080.000	3.080.000
2	BOP	-	-	-
3	SPP	-	-	-
4	WISUDA	4.650.000	4.650.000	-
5	MAKLAR	20.000.000	20.000.000	-
6	PONDOK ROMADHAN	-	-	-
7	P-SL	-	-	-
8	LKS	-	-	-
9	PERPUSTAKAAN	310.000	310.000	-
10	IAZAH (foto, remember, dll)	3.100.000	3.100.000	-
11	PENGEMBANGAN BAKAT	24.000.000	24.181.000	181.000
12	MILAD	6.000.000	14.344.000	8.344.000
13	PBM/PMBI	6.000.000	6.000.000	-
14	PEMELIHARAAN BUKU	12.000.000	12.000.000	-
15	KEMAH	8.000.000	8.120.000	120.000
16	INFAQ	20.000.000	20.000.000	-
17	KOPERASI	3.000.000	3.600.000	600.000
JUMLAH		235.960.000	310.265.000	74.305.000

REALISASI PENDAPATAN MADRASAH IBTIDAIYAH AT-TAUFIQIYAH AENGBAJA RAJA BLUTO SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2022/2023				
NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	SELISIH
A. MANAJEMEN				
1	Honor Mengajar (sisa form)	94.416.000	137.263.000	42.847.000
2	Honor Tugas Tambahan (sisa form)	71.832.000	68.073.000	- 3.759.000
3	Kebutuhan Perkantoran (Detail)	4.500.000	-	- 4.500.000
4	Biaya Perjalanan (Orang x kg)	10.844.000	38.174.000	27.330.000
5	Konsumsi rapat (orang x kg)	3.240.000	4.765.000	1.525.000
6		4.000.000	6.251.000	2.251.000
7		-	-	-
B. PENGHARGAAN SISWA PRESTASI				
1	Prestasi Kecamatan (orang x kg)	3.900.000	400.000	- 3.500.000
2	Prestasi Kabupaten (orang x kg)	750.000	-	- 750.000
3	Prestasi Provinsi (orang x kg)	1.000.000	-	- 1.000.000
4	Prestasi Nasional (Orang x kg)	750.000	-	- 750.000
5	Bintang Pelajar dan Pahlawan	1.000.000	200.000	- 800.000
6		400.000	200.000	- 200.000
7		-	-	-
C. BANTUAN SOSIAL				
1	Bantuan Sosial (orang x kg)	7.075.000	4.555.000	- 2.520.000
		4.000.000	1.310.000	- 2.690.000

Sumber: Bendahara Umum Yayasan Pondok Pesantren At-Taufiqiyah

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Berdasarkan gambar 5, dapat diketahui bahwa meskipun hanya laporan keuangan secara sederhana, akan tetapi Pondok Pesantren At-Taufiqiyah sudah melakukan rekapitulasi pendapatan organisasi secara komprehensif namun belum ada pengklasifikasian pendapatan dari asset neto yang dibatasi maupun tidak dibatasi, hal ini seperti yang disampaikan oleh bendahara umum Yayasan. Dari gambar 5, juga dapat diketahui bahwa pemasukan uang yang dicatat hanya berupa infaq santri/ siswa namun untuk waqaf belum dilakukan pencatatan karena waqaf yang diterima berupa tanah dari pengasuh pondok pesantren dan bukan berupa uang tunai, hal ini seperti yang disampaikan oleh bendahara umum dan sekretaris jenderal pondok pesantren. Selain hanya berupa pelaporan pemasukan dan pengeluaran saja, format pencatatan yang dilakukan sudah menggunakan double entry debet kredit meskipun belum menggunakan akun-akun laporan keuangan. Hal ini disampaikan oleh bendahara umum pondok pesantren. Berikut ini merupakan contoh dari format pelaporan keuangan rekapitulasi RK-RAPB yang ada di Pondok Pesantren At- Taufiqiyah:

Gambar 6 : Contoh Format Laporan Keuangan Rekapitulasi RK-RAPB

REKAPITULASI RK-RAPB				
PONDOK PESANTREN AT-TAUFIQIYAH				
AENGBAJA RAJA BLUTO SUMENEP				
TAHUN ANGGARAN 2023-2024				
NO	NAMA LEMBAGA	DEBET	KREDIT	SALDO
1	KB. AT-TAUFIQIYAH	51.340.000	143.293.000	- 91.953.000
2	TK. AT-TAUFIQIYAH	97.710.000	181.070.000	- 83.360.000
3	MI. AT-TAUFIQIYAH	285.465.000	344.878.800	- 59.413.800
4	MTS. AT-TAUFIQIYAH	558.375.000	1.187.883.000	- 629.508.000
5	MA. AT-TAUFIQIYAH	650.734.800	808.903.200	- 158.168.400
6	SMK. AT-TAUFIQIYAH	367.200.000	333.860.000	33.340.000
7	MADIN. AT-TAUFIQIYAH	289.800.000	259.978.000	29.824.000
8	WILAYAH AL-HASYIMI	116.400.000	200.790.000	- 84.390.000
9	WILAYAH AL-KHOZAIMAH	147.600.000	159.450.000	- 11.850.000
10	SEKRETARIS PPA			-
11	BENDAHARA PPA			-
12	BIRO PENDIDIKAN PPA			-
13	BIRO KEPESANTREAN PPA			-
14	BIRO EKONOMI			-
15	BIRO PEMBANGUNAN			-
16	BADAN OTONOM			-
17				-
18				-
19				-
20				-

Sumber: Bendahara Umum Pondok Pesantren At-Taufiqiyah

Pondok Pesantren At-Taufiqiyah melakukan pelaporan keuangan Yayasan berdasarkan periode tahun ajaran dari Juli sampai Juni setiap tahunnya, hal ini disampaikan oleh bendahara umum Yayasan Pondok Pesantren. Dari ketiga informan pengurus pondok pesantren dalam penelitian ini menyampaikan bahwa dalam menyajikan informasi keuangan pesantren dilakukan sebatas pengetahuan saja karena ketidakpahaman terhadap ilmu akuntansi serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan pengurus pesantren:

“pencatatan keuangan yang dilakukan di pondok pesantren ini hanya mencatat

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

uang yang masuk dan uang yang digunakan saja. Pencatatannya pun hanya dicatat sangat sederhana tidak ada debit dan kredit seperti di akuntansi pada umumnya karena keterbatasan tenaga dan pengetahuan kami di bidang akuntansi. Semua pengelolaan keuangan pondok pesantren disampaikan dan dipertanggung jawabkan di rapat pengurus beserta pengasuh di bulan Ramadhan dan tutup buku juga di bulan Ramadhan”.

B. Kesesuaian Akuntansi Pesantren dengan ISAK 35

Berikut ini data kesesuaian implementasi akuntansi pesantren terhadap ISAK 35:

No.	ISAK 35	PP Al-Mahmudiyah	PP MiftahulUlum	PP At-Taufiqiyah
1.	Laporan posisi keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Laporan penghasilan komprehensif	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Laporan perubahan asset neto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Laporan arus kas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Catatan atas laporan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Periode pencatatan akuntansi	Syawal - Ramadhan	Syawal-Ramadhan	Juli- Juni

Sumber: Data diolah 2024

C. Pembahasan

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang sumberdayanya diperoleh dari sumbangan, waqaf, maupun hibah baik dari pendiri maupun anggota dan pihak eksternal pondok pesantren. Berbeda dengan organisasi profit oriented, para donator dan waqif tidak mengharapkan nimbalan apapun dari sumber daya yang diberikan kepada organisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Meskipun tidak mengharapkan imbalan, para waqif, donator dan pengasuh Yayasan tetap membutuhkan informasi keuangan atas sumber daya yang telah diamanahkan kepada organisasi. Hal ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pengurus yayasan telah tepat guna dan tepat sasaran atau tidak. Selain untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja keuangan, dengan adanya pelaporan keuangan yayasan pondok pesantren dapat mengetahui posisi keuangan dan arus kas pondok pesantren sehingga bisa digunakan untuk pengambilan Keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Mengacu pada ISAK 35, sebagai organisasi nirlaba, pondok pesantren setidaknya menyajikan lima laporan keuangan. lima laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Pelaporan keuangan entitas nirlaba berbasis ISAK 35 dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas keuangan entitas (Setiawati & Hafni, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di tiga pondok pesantren di tiga

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

kabupaten di Madura dapat diketahui bahwa pelaksanaan akuntansi pesantren masih dilakukan secara sederhana. Satu dari tiga pondok pesantren dalam penelitian ini masih melakukan pencatatan secara manual untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Dua pondok pesantren lainnya, meskipun hanya melakukan pencatatan secara sederhana telah melakukan pencatatan berbasis komputer, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru dan Pondok Pesantren At-Taufiqiyah di Sumenep. Meskipun dilakukan secara sederhana, tiga pondok pesantren ini memiliki format pencatatan yang berbeda juga, dengan kata lain belum ada keseragaman pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas antara ketiga pondok pesantren ini. Namun demikian, pengakuan penerimaan dan penggunaan kas di dua pondok pesantren ini dilakukan pada saat uang diterima atau digunakan yang dikenal dengan istilah cash basis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Maulana & Rahmat, 2021) yang menyebutkan bahwa pelaporan keuangan di Masjid Besar Al-Atqiyah dilakukan secara cash basis. Dua pondok pesantren yang menggunakan cash basis, yaitu Pondok Pesantren Al-Mahmidiyah, dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Penggunaan cash basis ini dapat memberikan informasi tentang likuiditas suatu organisasi yang dapat digunakan dalam pengambilan Keputusan ekonomi (Risal, 2023).

Jika mengacu pada tujuan organisasi nirlaba, informasi tentang likuiditas bukanlah menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Informasi yang penting dimuat dalam

suatu pelaporan keuangan pondok pesantren yaitu yang juga dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan pesantren agar dapat mengambil keputusan strategis serta untuk akuntabilitas terhadap donator dan pengasuh pondok pesantren dengan cara menggunakan accrual basis. Pondok pesantren yang menggunakan accrual basis yaitu Pondok Pesantren At-Taufiqiyah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya akun piutang yang disajikan dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya, pengukuran yang dilakukan di tiga pondok pesantren ini sudah menggunakan satuan moneter dalam satuan rupiah.

Sementara itu, meskipun sudah mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam satuan moneter akan tetapi ketiga pondok pesantren yang menjadi objek penelitian ini belum menyajikan informasi posisi keuangan pondok pesantren yang memuat informasi tentang posisi aset, kewajiban, serta asset netonya. Ketiga pondok pesantren ini hanya menyajikan informasi saldo kas berdasarkan saldo kas terakhir di laporan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa adanya informasi piutang. Penyajian piutang menjadi penting untuk dilakukan terutama bagi pondok pesantren yang memiliki unit bisnis. Hal penting lainnya yaitu penyajian asset baik berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan serta penyusutannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan diketahui bahwa masing-masing pondok pesantren belum melakukan pencatatan yang menyajikan informasi asset berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan sehingga tidak dapat memuat informasi tentang jumlah aset yang dimiliki.

Selain tidak menyajikan aset, ketiga pondok pesantren ini juga tidak menyajikan informasi hutang. Jika mengacu pada dokumentasi pelaporan keuangan berupa pengeleuran uang di Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, terdapat kesalahan penggunaan akun piutang. Akun piutang lebih tepat digunakan dalam pelaporan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

penerimaan kas bukan pengeluaran kas karena piutang merupakan tagihan yayasan pondok pesantren ke pada pihak lain. Sementara untuk pengeluaran kas untuk pembayaran gaji guru dan pembayaran antar lembaga yang belum dipenuhi lebih tepat menggunakan akun hutang. Selain belum menyajikan informasi jumlah aset dan hutang, ketiga pondok pesantren ini belum menyajikan informasi aset neto baik dengan batasan maupun tanpa pembatasan. Tidak disajikannya informasi aset, hutang, dan aset neto dalam laporan posisi keuangan, pesantren tidak akan dapat mengetahui rasio-rasio keuangan yang dimiliki. Laporan posisi keuangan pesantren dapat digunakan untuk menilai kemampuan pesantren dalam memberikan jasa secara berkelanjutan, serta untuk dapat menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, dan kebutuhan pendanaan pesantren (Listiyowati, 2021).

Laporan perubahan aset neto penting untuk disajikan agar para pengguna dapat mengetahui kondisi apakah pesantren sudah maksimal dalam menggunakan sumberdaya aset kas dan non kas sehingga dapat menghasilkan surplus aset neto baik yang dibatasi maupun tanpa pembatasan. Aset neto tidak terikat pada ketiga pondok pesantren ini hanya mencatat infaq dari santri, sumbangan berupa bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Sementara itu, hibah maupun waqaf dari pendiri yayasan pondok pesantren belum pernah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Mengacu pada ISAK 35 yang menjelaskan bahwa Penerapan Pedoman akuntansi pesantren diperuntukkan untuk pondok pesantren yang memiliki badan hukum Yayasan. Selain itu PAP ini diharapkan dapat memisahkan aset yayasan dan pribadi para pengurus (Atieq Amjadalah Alfie & Prasetyo Aji Triyoga, 2023).

Selain belum menyajikan informasi tentang jumlah aset pondok pesantren, Pondok Pesantren Al-Mahmidiyah dan Miftahul Ulum belum menyajikan informasi penghasilan secara komprehensif. Bendahara umum Yayasan tidak menyajikan informasi secara komprehensif tentang penghasilan dan biaya operasional maupun non operasional pondok pesantren baik yang bersumber dari aset neto tanpa pembatasan maupun yang dibatasi sehingga baik pengasuh maupun donator dapat mengetahui kinerja keuangan pondok pesantren. Meskipun demikian bukan berarti penghasilan dan biaya-biaya yang terjadi tidak ada pencatatannya. Masing-masing lembaga di dua pondok pesantren ini mencatat penerimaan kas berupa infaq ataupun SPP dari santri dan biaya operasional pada bendahara lembaga.

Berbeda dengan dua pondok pesantren dalam objek penelitian ini, bendahara umum Pondok Pesantren At- Taufiqqiyah sudah melakukan pencatatan penghasilan komprehensif meskipun hanya berupa rekapitulasi secara sederhana. Pondok pesantren ini sudah menyajikan informasinya baik dari lembaga-lembaga akan tetapi juga dari unit bisnis yang dimiliki oleh pondok pesantren. Meskipun sudah menyajikan pendapatan secara komprehensif bendahara umum pondok pesantren ini belum menyajikan biayaoperasional maupun non operasional secara komprehensif. Sama halnya dengan Pondok Pesantren Al- Mahmudiyah dan Miftahul Ulum, biaya operasional Pondok Pesantren At- taufiqqiyah dicatat secara rinci oleh bendahara masing-masing lembaga dan unit bisnis. Selain tidak menyajikan informasi biaya secara komprehensif, ketiga pondok pesantren ini tidak menyajikan informasi penyusutan aset tetap karena tidak ada pencatatan maupun penyajian informasi aset

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

tetap pondok pesantren.

Selanjutnya, untuk informasi arus kas pondok pesantren dalam penelitian ini juga belum dilakukan pencatatan, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian baik dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ketiga pondok pesantren ini hanya mencatat uang masuk dan keluar tanpa adanya pengklasifikasian aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Tanpa adanya informasi arus kas, pondok pesantren ini tidak dapat memprediksikan arus kas masa depan. Laporan arus kas dapat berguna bagi entitas non profit oriented untuk menilai kemampuan pesantren dalam menghasilkan kas maupun setara kas (Setiadi, 2021).

Selain tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, periode pelaporan keuangan pondok pesantren di Madura juga ada yang menggunakan tahun Hijriyah sebagai periode akuntansinya. Pondok pesantren yang menggunakan tahun Hijriyah dalam pelaporannya yaitu Pondok Pesantren Al- Mahmudiyah dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Mengacu pada Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP), periode pelaporan akuntansi pondok pesantren dapat menggunakan tahun Hijriyah atau Masehi. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan pesantren dengan ISAK 35 disebabkan oleh minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengetahuan pengurus (bendahara) pesantren terhadap ilmu akuntansi sehingga pencatatan dilakukan secara sederhana sebatas pengetahuan pengurus pesantren saja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Salamah & Nasrullah, 2023) yang menjelaskan bahwa pondok pesantren Az-Zabur Kajen belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 karena keterbatasan SDM.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi pesantren di Madura belum sesuai dengan ISAK 35 karena baik secara pengakuan dan pencatatan tidak sama dengan yang dijelaskan ISAK 35, hanya dalam penyajian dan periode pelaporannya yang sesuai dengan ISAK 35, hal tersebut dikarenakan penerapan akuntansi pesantren di Madura diterapkan dalam format yang berbeda beda di masing- masing pesantren karena belum mengacu pada ISAK 35 karena keterbatasan SDM dan minimnya pengetahuan pengurus pesantren terhadap ilmu akuntansi.

REFERENCE

- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 1(2). <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Andriani, Mahyuni, & Nurhidayati. (2021). Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 75–85.
- Atieq Amjadalah Alfie & Prasetyo Aji Triyoga. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v18i2.10209>
- Aulia, F. U. (2020). *Akuntansi Bank Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPS 2013. (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2020)*. IAIN Madura Press.
- Berta SL Danafia. (2023, Senin, Oktober | :07 WIB). Refleksi Hari Santri Nasional 2023 di Madura, 195.211 Santri Siap Jayakan Negeri,” Radar Madura,. *Radar Madura*.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

<https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/743101515/refleksi-hari-santri-nasional-2023-di-madura-195211-santri-siap-jayakan-negeri#:~:text=Julukan%20itu%20merujuk%20pada%20banyaknya,santri%20yang%20siap%20jayakan%20negeri.>

- Harmono. (2020). *Manajemen Keuangan*. PT. Bumi Aksara.
- Hartono, P. (2023). *PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PESANTREN*.
- Hery. (2011). *Teori Akuntansi* (1 Cetakan ke-2). Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Draf Exposure ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khilmiah, E. N. (2020). *IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN PADA PELAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN AS SAFALI AL FITRAH SURABAYA*. 9.
- Kirowati, D., Suhasto, R. I. N., & Anggraeny, S. N. (2021). *IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN PADA PONDOK PESANTREN AL-MUJADDADIYYAH KOTA MADIUN*. 5(2).
- Listiyowati, L. (2021). Kajian Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada Pondok Pesantren. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 168–182. <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.146>
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). *PENERAPAN ISAK NO. 35 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA PADA MASJID BESAR AL-ATQIYAH KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA*.
- Mujiani, S., Abdurrosyid, M., & Nisa, Z. Z. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Excel Macro Sesuai ISAK 35 dan PSAK 109 pada Masjid Wilayah Lubang Buaya Jakarta. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 01(02).
- Neni, L., Hanum, Z., & Karlina, L. (2023). PENERAPAN ISAK 35 BERBASIS EXCEL PADA MASJID ARRAUDHAH DI KECAMATAN MEDAN JOHOR. *Jurnal Multimedia dan Teknologi Informasi*, 05(02), 130–139. <https://doi.org/doi.org/10.54209/jatilima.v5i02.462>
- Puspita, L. M. N., Halimatusyadiah, H., & Usman, D. (2022). Literasi dan Pelatihan Dasar Akuntansi Masjid berbasis ISAK 35 bagi Pengurus Masjid di Kota Bengkulu. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 167–181. <https://doi.org/10.35912/jnm.v1i3.726>
- Risal, M. (2023). Cash Basis Vs Accrual Basis dalam Pengambilan Keputusan pada Entitas Syariah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(5), 419–425. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i5.734>
- Rozaidin, M., & Adinugraha, H. H. (2020). Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3716>
- Rumiati, R. (2022). *Vol. VIII No.1 Januari-Juni 2022 Page 1-19 jiap@uin-alauddin.ac.id*.
- Salamah, B., & Nasrullah, M. (2023). Implementasi Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Az-Zabur Kajen Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(1), 65–76. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i1.7031>
- Sari, D. I. (n.d.). *Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35*.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Setiadi. (2021). IMPLEMENTASI ISAK 35 (NIR LABA) PADA ORGANISASI NON LABA (MASJID, SEKOLAH, KURSUS). *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.701>
- Setiawati, B., & Hafni, D. A. (2023). Implementasi ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Panti Asuhan. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 101. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.101-114>
- STAI Al Husain Magelang, & Yanuar, F. (2019). Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.37758/annawa.v1i1.127>
- Suherman, & Pamungkas, L. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Surya, R. A. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Versi IFRS (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah, "Perspektif, Metodologi, dan Teori"* (kedua). PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardoyo, D. U., Perdana, N. A. R., & Khotimah, D. K. (2022). Analisis Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Syamsul Ulum Periode 2021. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 356–369. <https://doi.org/10.51903/jupea.v2i3.387>